

Peran Indonesia Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Sabah antara Malaysia Dari Filipina

Indonesia's Role in Resolving the Sabah Regional Dispute between Malaysia and the Philippines

Abdul Asha Syahdad^{1*}, Muchamad Nauval N S², Prilla Marsingga³

^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 05, 2023

Revised Oktober 10, 2023

Accepted Oktober 15 2023

Available online Oktober 25, 2023

Kata Kunci: Sengketa Wilayah, Filipina, Malaysia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda Kruengmane

ABSTRAK

Jurnal ini membahas ini membahas sengketa wilayah antara Malaysia dan Filipina atas Sabah, sebuah negara bagian di Malaysia yang terletak di bagian utara pulau Kalimantan. Konflik ini bermula dari klaim Kesultanan Sulu atas wilayah tersebut, yang diyakini telah disewakan kepada British North Borneo Company pada tahun 1878 dan diwarisi oleh Malaysia setelah kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957. Perselisihan ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan banyak pihak, termasuk upaya diplomatik dan militer oleh kedua belah pihak. Indonesia, sebagai negara tetangga, telah berperan dalam memediasi konflik tersebut, namun keterlibatannya masih terbatas. Jurnal ini juga membahas dinamika perselisihan Sabah yang merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan faktor sejarah, hukum, dan politik. Perselisihan ini masih belum terselesaikan, dan baik Malaysia maupun Filipina terus menegaskan klaim mereka atas Sabah. Lalu dapat di simpulkan bahwa konflik tersebut merupakan masalah bilateral antara Malaysia dan Filipina, dan penyelesaiannya masih merupakan tantangan.

PENDAHULUAN

Negara adalah subyek utama dalam hukum internasional¹ karena negara memiliki kemampuan penuh dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain dan subyek-subyek hukum internasional lainnya.² Kehadiran negara sebagai subyek hukum internasional sangat berpengaruh dan dominan dalam berbagai aspek. Dominan peranan ini dalam hubungan-hubungan hukum internasional tidak terlepas dari kelebihan negara, yakni negara mempunyai apa yang disebut dengan kedaulatan.³

Saling membutuhkan antar negara satu dengan yang lain diberbagai bidang dalam hidup dan kehidupan memberikan dampak timbulnya sebuah hubungan yang bersifat tetap serta berkelanjutan dan berdampak timbulnya kepentingan untuk menjaga dan memelihara hubungan tersebut.⁴ Ikatan antar negara awalnya berjalan lancar, baik namun ada kalanya berjalan kurang baik. Sebabnya ada pihak yang melakukan pengingkaran yang berdampak lahirnya konflik. Konflik negara bisa berakar dari beberapa unsur, diantaranya Ideologi, ekonomi, politik, maupun keterkaitan antar kepentingan terkait.⁵ Dalam interaksi sesama manusia, konflik atau sengketa merupakan hal biasa terjadi. Konflik sengketa Sabah antara Malaysia dan Filipina yang belum usai.

Sabah adalah sebuah negara bagian yang terletak di utara Pulau Kalimantan. Pada abad ke-16, Kesultanan Brunei mengendalikan sebagian besar wilayah di utara pulau yang merupakan pulau ketiga terbesar di dunia. Pulau ini dikenal dengan sebutan "Borneo," dan

¹ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional I (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).

² I Wayan Phartiana, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2003).

³ Ibid.

⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Bunga Rampai Hukum Internasional (Bandung: Pt Alumni, 2003).

⁵ Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Universitas Indonesia (Ui-Press), 2006).

namanya diambil dari Kesultanan Brunei yang juga memberi nama "Sabah" pada wilayahnya yang terletak di bagian utara Pulau Borneo.⁶

Sabah mencakup seluruh bagian utara yang membentang dari pantai barat hingga ke wilayah pesisir timur Pulau Borneo. Kawasan Sabah mencakup area dari Sungai Sulaman hingga Teluk Marudu, meliputi daerah seperti Sungai Paitan, Sibuku, Sugut, Banggaya, Labuk, Sandakan, Kinabatangan, Mumiang, Kimanis, Benoni, Teluk Gaya, Teluk Sepanggar, dan Pulau Banggi.⁷

Selain Serawak, Sabah juga, sebagai bagian administratif Malaysia, berperan penting dalam mendukung kelancaran urusan ekonomi di negara tetangga ini. Namun, jika dibandingkan dengan Brunei, kondisi di kedua wilayah ini sangat berbeda.⁸

Sabah adalah salah satu negara bagian di Malaysia yang juga menjadi salah satu anggota pendiri negara Malaysia di Pulau Kalimantan. Sabah terletak di sebelah timur laut Kalimantan. Meskipun lebih kecil dari negara bagian serumpunnya, Sarawak, ibu kota Sabah adalah Kota Kinabalu.⁹

Sabah, yang berada di utara Pulau Borneo, dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak. Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah ini tidak selalu mencerminkan kekayaan alam yang melimpah. Sabah, Serawak, dan Brunei adalah wilayah-wilayah yang berdekatan satu sama lain.¹⁰

Konflik yang memicu insiden di Sabah berasal dari klaim Kesultanan Sulu atas wilayah seluas 74.000 kilo meter persegi. Para pengikut Sultan Sulu tersebut mengklaim wilayah Sabah mulai dari Sungai Pandassan di pesisir barat laut hingga pesisir pantai timur dan Sungai Sibuco di selatan. Turun-temurun Kesultanan Sulu mengklaim bahwa wilayah ini mencakup daerah seperti Paitan, Sugut, Banggaya, Labuk, Sandakan, Kinabatangan, hingga ke Teluk Darvel di bagian selatan.¹¹

Pada tanggal 12 Februari 2013, terjadi ketegangan yang melibatkan para pengikut Kesultanan Sulu yang biasanya tinggal di Filipina di wilayah Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Mereka bertekad untuk mengklaim kembali wilayah Sabah, yang menurut pandangan mereka adalah tanah leluhur mereka. Konflik timbul karena Kesultanan Sulu memandang Sabah sebagai wilayah yang sebelumnya disewakan kepada Malaysia dan ingin mengakhiri perjanjian sewa tersebut. Malaysia, di sisi lain, tidak bersedia memenuhi permintaan Kesultanan Sulu.¹²

Defenisi Operatif

Menurut Victor Prescott, sengketa di wilayah perbatasan dapat terjadi dalam empat kelompok berikut:

- a) Sengketa Posisi: Ini adalah konflik yang muncul karena perbedaan interpretasi terhadap dokumen hukum atau perubahan di lokasi yang mengubah tanda-tanda fisik yang digunakan sebagai batas.
- b) Sengketa Wilayah: Sengketa ini terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim wilayah yang sama atau bagian dari wilayah yang sama. Ini sering terjadi karena alasan sejarah atau kepentingan geografis.
- c) Sengketa Fungsional: Ini adalah konflik yang terjadi karena pengerahan orang dan barang akibat kurangnya penjagaan yang ketat di wilayah perbatasan.
- d) Sengketa Sumber Daya Alam Lintas Batas: Ini adalah sengketa yang timbul karena negara lain mengeksploitasi sumber daya alam yang merugikan negara lain di perbatasan.

Sengketa wilayah Sabah antara Malaysia dan Filipina merupakan salah satu sengketa wilayah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sabah merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga menjadi objek sengketa antara kedua negara. Filipina mengklaim

⁶ Laude, Jaime and Pareño, Roel (20 February 2013). "Malaysia urged: Don't harm men of sultan". The Phillipine Star.

⁷ Gudgeon, L. W. W. 1913. British North Borneo. Adam and Charles Black, London.

⁸ Mullen, Jethro (15 February 2013). "Filipino group on Borneo claims to represent sultanate, Malaysia says". CNN. Diakses 25 Juli 2013.

⁹ <http://www.mmea.gov.my/> diakses tanggal 16 Mei 2013 jam 20.00 wib

¹⁰ <http://www.qsl.net> diakses tanggal 8 Agustus 2013

¹¹ <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/13/02194085/Klaim.Wilayah.Sulu.Buka.Kotak.Pandora> diakses tanggal 16 Mei 2013 jam 20.00 wib

¹²Erwin S. Fernandez, Philipine/Malaysia dispute offer Sabah: a bibliographic survey, Asia Pasific Social Science, Vol. 7 No.2, 1 Desember 2007, Hal. 55

bahwa Sabah merupakan wilayah Filipina yang diambil alih oleh Inggris dan kemudian diserahkan kepada Malaysia pada tahun 1963. Sementara itu, Malaysia mengklaim bahwa Sabah merupakan wilayah yang sah milik Malaysia. Hingga saat ini, sengketa wilayah Sabah masih menjadi perdebatan antara kedua negara.¹³

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian pada jurnal ini, menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis konflik yang dibahas dan peran Indonesia pada konflik ini dan penelitian ini difokuskan untuk menemukan metode penyelesaian sengketa wilayah antara malaysia dan filipina. Kegiatan analisis ini diperlukan dukungan data atau fakta – fakta dengan bersumber dari berbagai jurnal dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sengketa Wilayah Sabah

Sengketa Sabah adalah sengketa wilayah antara Malaysia dan Filipina mengenai bagian timur negara bagian Sabah di Malaysia. Perselisihan tersebut bermula dari klaim Kesultanan Sulu, bekas negara Islam di Filipina selatan, bahwa Sabah disewakan kepada British North Borneo Company pada tahun 1878 dan bahwa sewa tersebut diwarisi oleh Malaysia ketika memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957. Perselisihan ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan upaya diplomatik dan militer oleh kedua belah pihak. Berikut beberapa poin penting mengenai dinamika perselisihan Sabah:

- a) Sengketa tersebut merupakan persoalan kompleks yang melibatkan faktor sejarah, hukum, dan politik.
- b) Filipina mengklaim Sabah merupakan bagian wilayahnya berdasarkan klaim sejarah Kesultanan Sulu.
- c) Malaysia, sebaliknya, bersikukuh bahwa Sabah adalah bagian wilayahnya berdasarkan perjanjian tahun 1878 antara Kesultanan Sulu dan British North Borneo Company.
- d) Perselisihan ini telah menyebabkan beberapa konflik bersenjata antara Filipina dan Malaysia, termasuk konflik Lahad Datu pada tahun 2013, ketika sekelompok pria bersenjata dari Filipina mendarat di Sabah untuk menegaskan klaim mereka atas wilayah tersebut.¹⁴
- e) Perselisihan ini juga telah dibahas di forum internasional, seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)¹⁵
- f) Perselisihan ini masih belum terselesaikan, dan baik Malaysia maupun Filipina terus menegaskan klaim mereka atas Sabah

Sengketa Sabah merupakan sengketa wilayah yang kompleks antara Malaysia dan Filipina yang melibatkan faktor sejarah, hukum, dan politik. Perselisihan ini masih belum terselesaikan, dan kedua belah pihak terus menegaskan klaim mereka atas Sabah Ghazali Shafie, seorang politikus malaysia yang menjabat sebagai menteri luar negeri Malaysia Beliau mengatakan, *“secara alami, hal ini bukanlah merupakan masalah yang dapat diputuskan oleh Pengadilan. Namun demikian, rujukan ke Pengadilan dapat dilakukan, namun jika keputusan tersebut diambil atas dasar legalistik yang sempit (seperti yang terjadi dalam kasus Afrika Barat Daya beberapa tahun yang lalu), dan jika ditemukan bahwa kasus hukum Filipina adalah yang lebih kuat (yaitu bukan merupakan kesimpulan yang pasti), akibatnya hanya akan mengipasi kontroversi tersebut dan bukannya menyelesaikannya.”*

16

¹³ <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/201>

¹⁴ Kompas.com. (2011, Februari 22). Penyelesaian Konflik Thailand- Kamboja. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja>

¹⁵ Cipto, B, Op.cit., hal 40

¹⁶ <https://theaseanpost.com/article/sabah-dispute-refuses-go-away>

Peran Indonesia Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik

Indonesia berperan dalam memediasi konflik antara Malaysia dan Filipina terkait wilayah Sabah. Berikut adalah beberapa poin penting tentang keterlibatan Indonesia:

- a) Pada tahun 1960-an, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno berusaha menengahi konfrontasi Kalimantan antara Indonesia dan Malaysia, termasuk perselisihan Sabah. Namun upaya mediasi tidak berhasil dan konflik terus berlanjut.
- b) Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mempertahankan sikap netral terhadap sengketa Sabah, dengan menekankan pentingnya dialog dan penyelesaian damai. Indonesia telah menyerukan Malaysia dan Filipina untuk menyelesaikan masalah ini melalui cara damai dan sesuai dengan hukum internasional.
- c) Sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia mendukung prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara-negara anggotanya, termasuk sengketa Sabah. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa konflik Sabah mempunyai implikasi keamanan regional yang lebih luas dan ASEAN harus memainkan peran yang lebih aktif dalam menyelesaikan masalah ini.
- d) Pada tahun 2013, saat terjadi perselisihan di Lahad Datu antara Filipina dan Malaysia, Indonesia menawarkan bantuan dalam memediasi konflik tersebut, namun tawaran tersebut tidak diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.¹⁷

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk membantu menengahi perselisihan Sabah, perannya masih terbatas, dan penyelesaian konflik masih menjadi isu bilateral antara Malaysia dan Filipina. *"sudah kuredhai pajakan dengan keredhaan dan kesukaan kita sendiri kepada tuan Gustavus Baron von Overbeck yang tinggal dalam negeri Hong Kong dan kepada Alfred Dent Esquire yang tinggal dalam negeri London... sampai selama-lamanya sekalian perintah dan kuasa yang kita punya yang takluk kepada kita di tanah besar Pulau Borneo dari Sungai Pandasan di sebelah barat sampai sepanjang semua tanah di pantai sebelah timur sejauh Sungai Sibuku di sebelah Selatan"*¹⁸

KESIMPULAN

Teks tersebut membahas sengketa wilayah yang sedang berlangsung antara Malaysia dan Filipina atas Sabah, sebuah negara bagian di Malaysia yang terletak di bagian utara pulau Kalimantan. Konflik ini bermula dari klaim Kesultanan Sulu atas wilayah tersebut, yang diyakini telah disewakan kepada British North Borneo Company pada tahun 1878 dan diwarisi oleh Malaysia setelah kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957. Perselisihan ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan banyak pihak, upaya diplomatik dan militer oleh kedua belah pihak. Indonesia, sebagai negara tetangga, telah berperan dalam memediasi konflik tersebut, namun keterlibatannya masih terbatas. Teks tersebut juga membahas dinamika perselisihan Sabah yang merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan faktor sejarah, hukum, dan politik. Perselisihan ini masih belum terselesaikan, dan baik Malaysia maupun Filipina terus menegaskan klaim mereka atas Sabah. Teks tersebut menyimpulkan bahwa konflik tersebut merupakan masalah bilateral antara Malaysia dan Filipina, dan penyelesaiannya masih merupakan tantangan.

Referensi

- https://id.wikipedia.org/wiki/Persengketaan_Sabah
<https://media.neliti.com/media/publications/35369-ID-serangan-bersenjata-kesultanan-sulu-terhadap-wilayah-sabah-malaysia-berdasarkan.pdf>
<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/84/16>,
https://en.m.wikipedia.org/wiki/North_Borneo_dispute
<https://theaseanpost.com/article/sabah-dispute-refuses-go-away>

¹⁷ Kasit Piromya, ASEAN Harus Berbuat Lebih Banyak untuk Membantu Rohingya, The Diplomat 9 Maret 2020, <https://thediplomat.com/2020/03/asean-must-do-more-to-help-the-rohingyas/>

¹⁸ Aziz, H. (2016). Perjanjian Sulu-Overbeck 1878. Tuntutan Kesultanan Sulu Terhadap Sabah, 284.